

LAPORAN



**HASIL PELAKSANAAN
SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI
PADA
PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA**

**PERIODE JANUARI - MARET
TAHUN 2022**

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN TINGGI PALANGKARAYA

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah**

**Disahkan di Palangka Raya
Pada Hari Rabu, 13 April 2022**

Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya



**DR. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai Indeks Persepsi Anti Korupsi di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Palangkaraya mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menayakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang diambil dengan kuesioner.

Pelaksanaan survei ini merupakan kelanjutan implementasi perbaikan dari penilaian masyarakat pada survei periode sebelumnya, dan di dalam pelaksanaan survei dan laporan survei ini tentu masih perlu perbaikan- perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Palangkaraya dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palangka Raya, 13 April 2022

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BAB II	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi Dan Sampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan pelaksanaan.....	7
BAB III.....	9
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI.....	9
3.1. Profil responden.....	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator.....	15
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya	29
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya	31
BAB IV	33
PENUTUP	33
4.1. Kesimpulan.....	33
4.2. Rekomendasi	33

DAFTAR TABEL

<i>No. Tabel</i>	<i>Halaman</i>
1. Model Alur Penyusunan Survei SPAK Menuju Zona Integritas	7
2. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi	8
3. Nilai Persepsi	8
4. Tingkat Pendidikan Responden	9
5. Jenis Pekerjaan Responden	10
6. Domisili Responden	12
7. Usia Responden	13
8. Indeks Pada Indikator Manipulasi Peraturan.....	15
9. Indeks Pada Penyalahgunaan Jabatan.....	16
10. Indeks Pada Indikator Menjual Pengaruh	17
11. Indeks Pada Indikator Pada Transaksi Biaya.....	19
12. Indeks Pada Indikator Biaya Tambahan	20
13. Indeks Pada Indikator Hadiah	22
14. Indeks Pada Indikator Transparansi Biaya.....	23
15. Indeks Pada Indikator Percaloan.....	25
16. Indeks Pada indikator Perbuatan Curang.....	26
17. Indeks Pada Indikator Transaksi Rahasia	28
18. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya	29
19. Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada PT P. Raya.....	31
20. Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satker PT. P.Raya	32

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bersih dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Tinggi Palangkaraya untuk menjadi menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitik beratkan pada Integritas

penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bersih dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang

mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka atau secara online. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan atau data minimal 32 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya). Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPAK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan Indeks Persepsi Anti Korupsi masyarakat atas pelayanan

yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala Indeks Persepsi Anti Korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei SPAK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPAK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

3.1. Profil responden

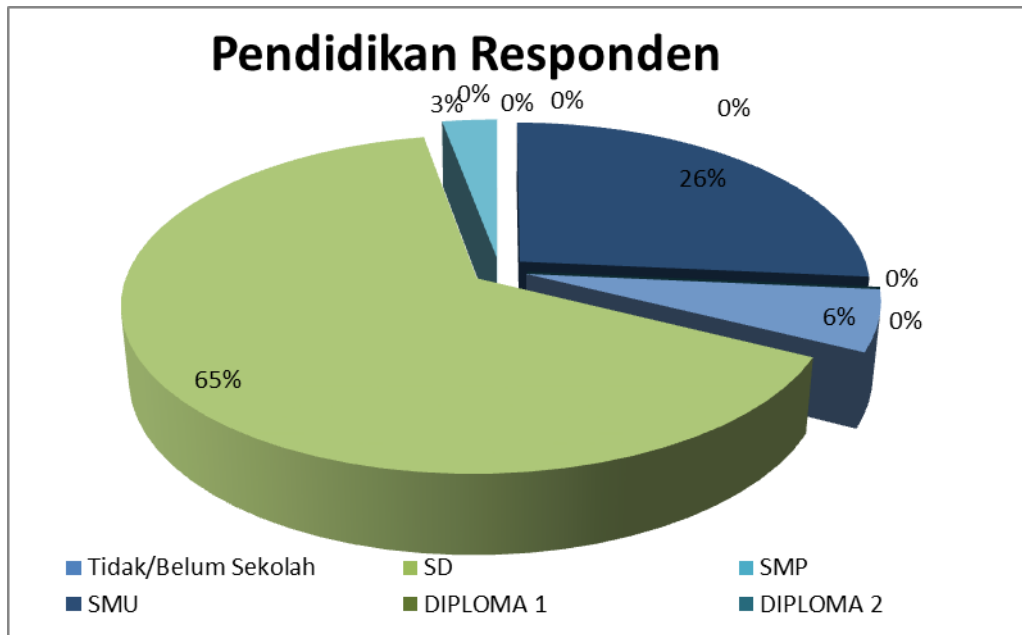
3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya mayoritas dengan latar Pendidikan S1 yaitu sebanyak 22 responden atau 65% dari total 3 responden.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No	Pendidikan	Frekuensi	Prosentase
1	Tidak/Belum Sekolah	0	0%
2	SD	0	0%
3	SMP	0	0%
4	SMU	9	26%
5	DIPLOMA 1	0	0%
6	DIPLOMA 2	0	0%
7	DIPLOMA 3	2	6%
8	S1	22	65%
9	S2	1	3%
10	S3	0	0%
Jumlah		34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Jawaban Responden

Gambar 3.1.1

Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Tingkat Pendidikan Terakhir

3.1.2. Pekerjaan responden

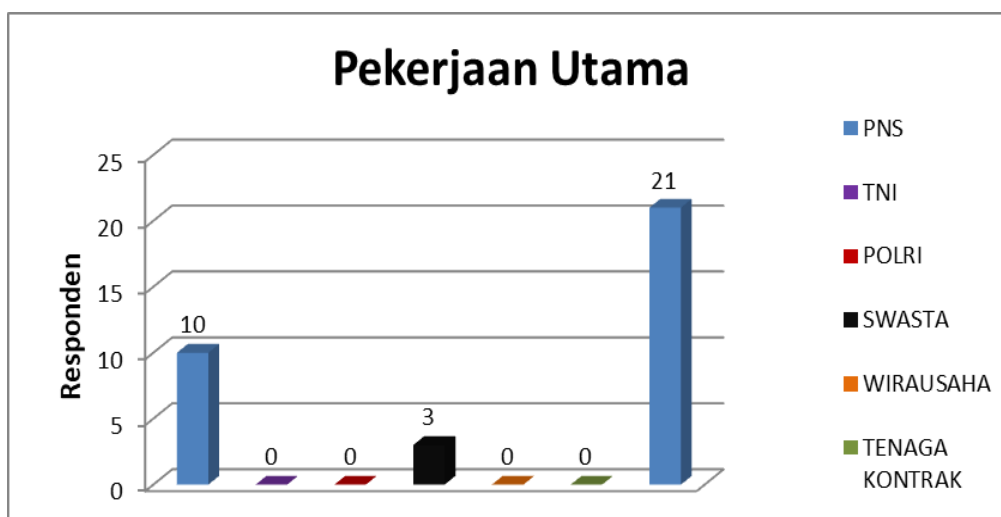
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 62% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki pekerjaan Lainnya yaitu sebanyak 21 (dua puluh satu) responden.

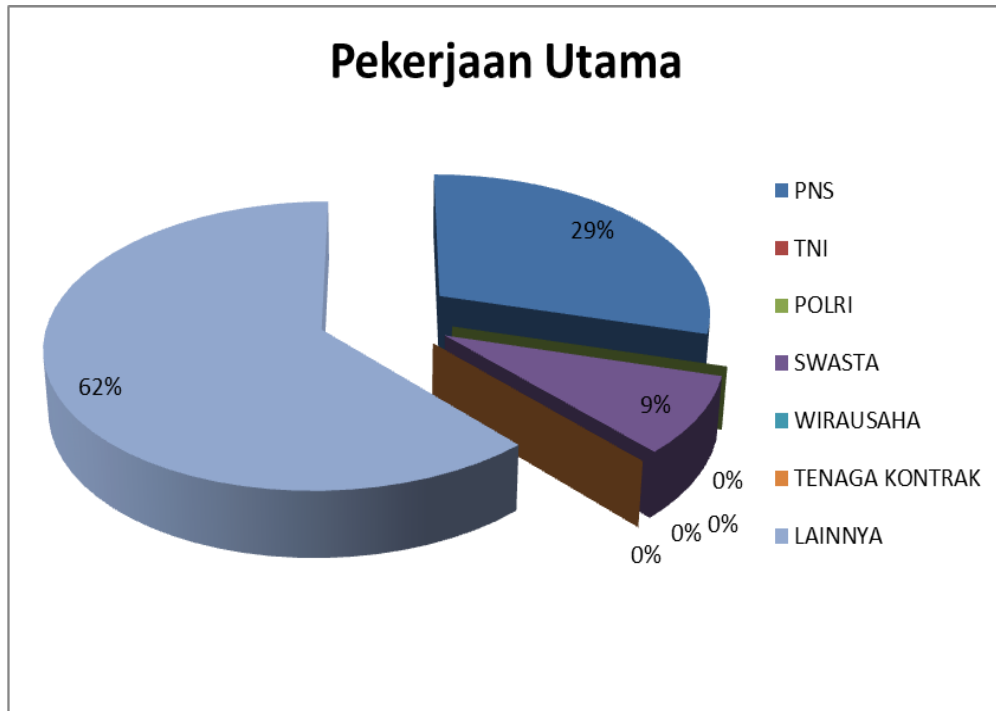
Tabel 5.

Jenis pekerjaan responden

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	Prosentase
1	PNS	10	29%
2	TNI	0	0%
3	POLRI	0	0%
4	SWASTA	3	9%
5	WIRSAUSAHA	0	0%
6	TENAGA KONTRAK	0	0%
7	LAINNYA	21	62%
Jumlah		34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:





Gambar 3.1.2
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Tingkat Pekerjaan

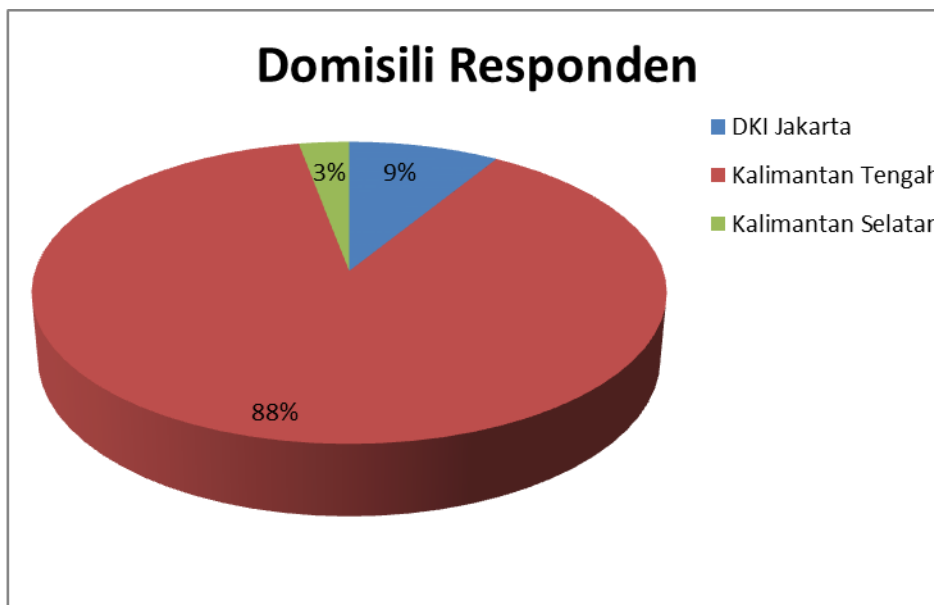
3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domisili, responden paling banyak berasal dari Kalimantan Tengah yaitu sebanyak 30 (tiga puluh) responden dengan prosentase 88%.

Tabel 6
Domisili Responden

No	Domisili Responden	Frekuensi	Prosentase
1	DKI Jakarta	3	9%
2	Kalimantan Tengah	30	88%
3	Kalimantan Selatan	1	3%
Jumlah		34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini:



Gambar 3.1.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Domisili

3.1.4. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia antara 18 tahun s/d 28 tahun yakni sebanyak 11 (sebelas) responden disusul usia antara 29 tahun s/d 39 tahun dengan jumlah responden sebanyak 10 (Sepuluh) responden. Kemudian disusul dengan usia antara 40 tahun s/d 49 tahun dan 50 tahun s/d 59 tahun dengan jumlah responden yang sama yaitu sebanyak 6 (enam) responden. Dan jumlah paling sedikit yaitu kelompok

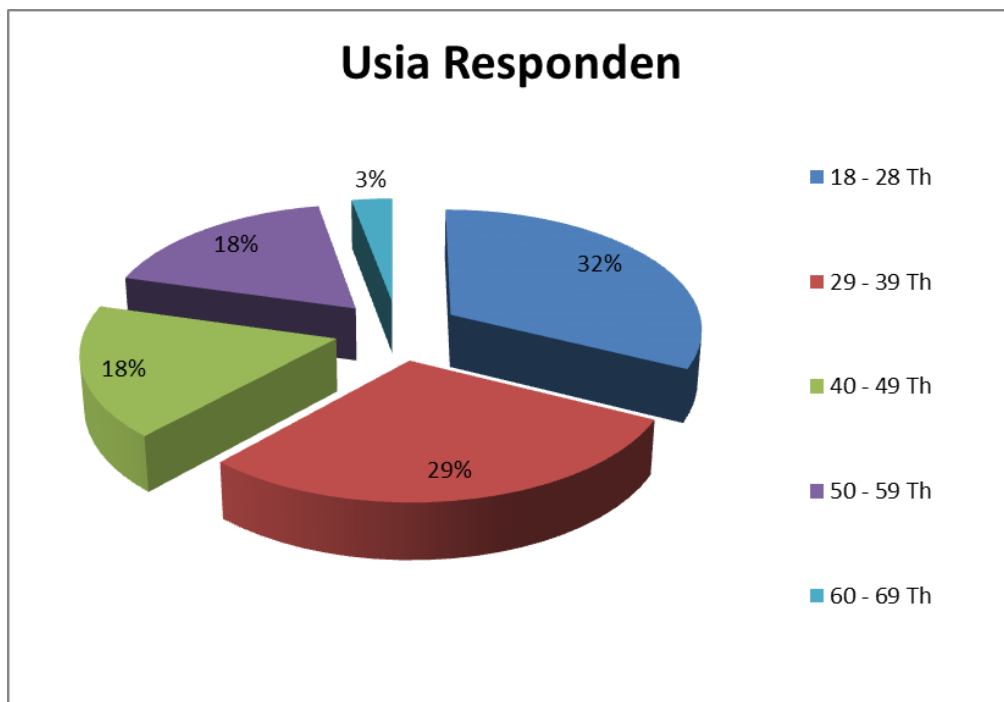
usia 60-69 tahun ke atas sejumlah 1 (satu) orang.

Tabel 7.

Usia responden

No	Usia Responden	Frekuensi	Prosentase
1	18 - 28 Th	11	32%
2	29 - 39 Th	10	29%
3	40 - 49 Th	6	18%
4	50 - 59 Th	6	18%
5	60 - 69 Th	1	3%
Jumlah		34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.1.4
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Usia Responden

3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada interval indeks 3,97.

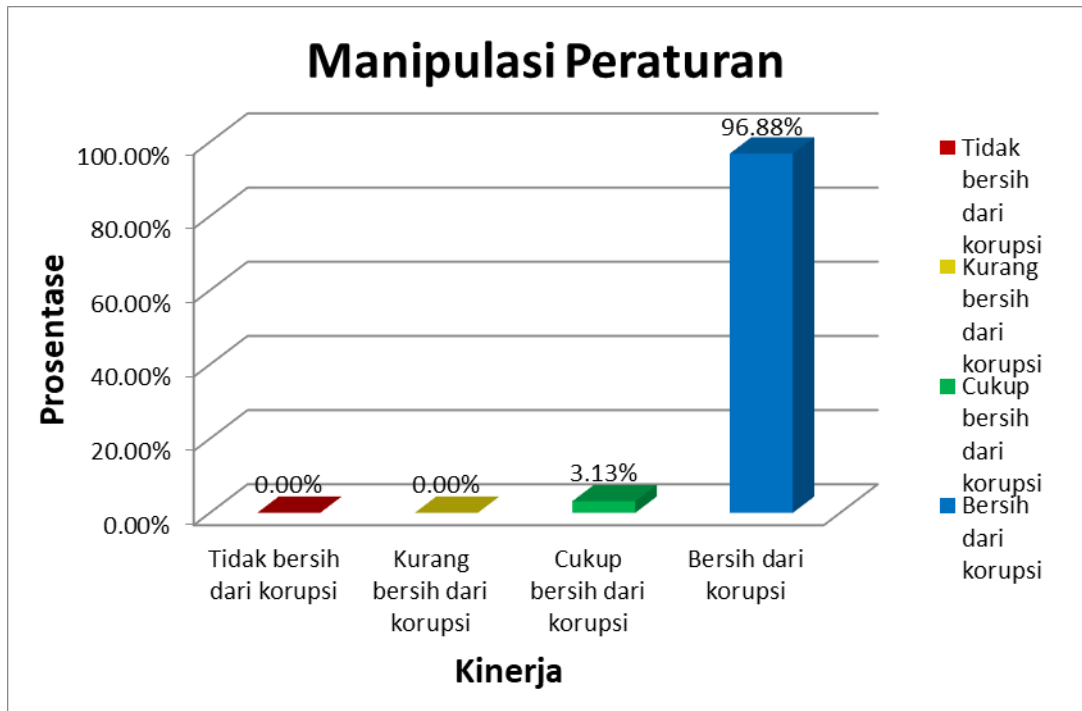
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari Korupsi dan terlihat pada tabel 8.

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%	
Jumlah			32	127	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.1
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Manipulasi Peraturan

3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari Korupsi.

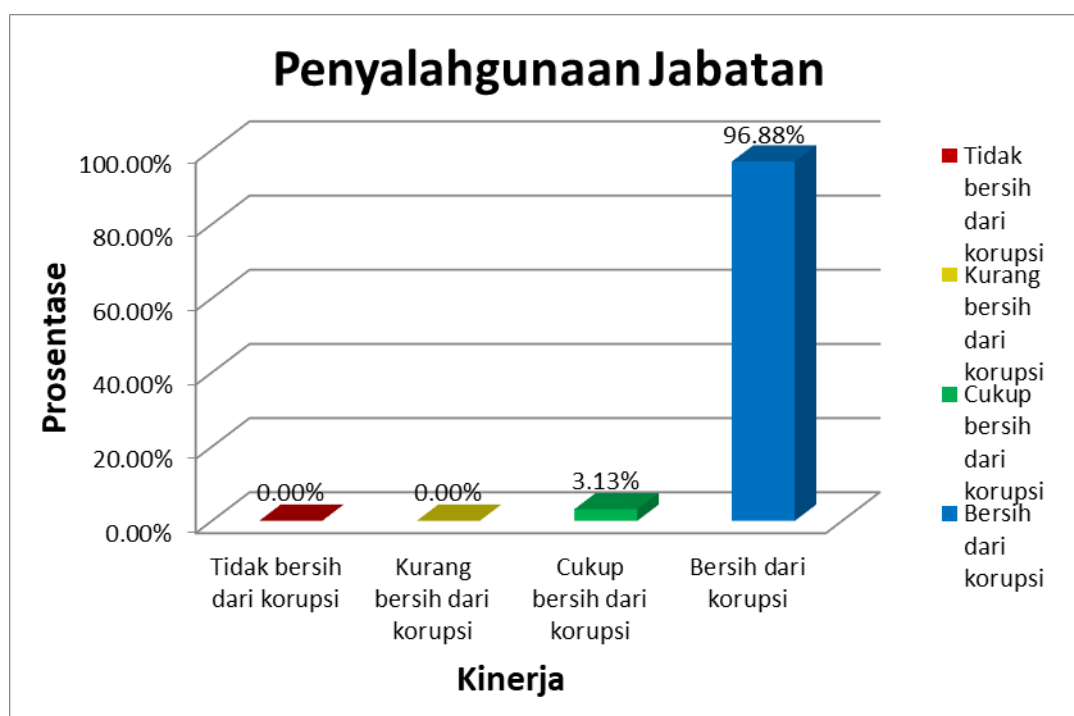
Tabel 9.

Indeks pada penyalahgunaan jabatan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	

1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%	
Jumlah			32	127	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.2
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

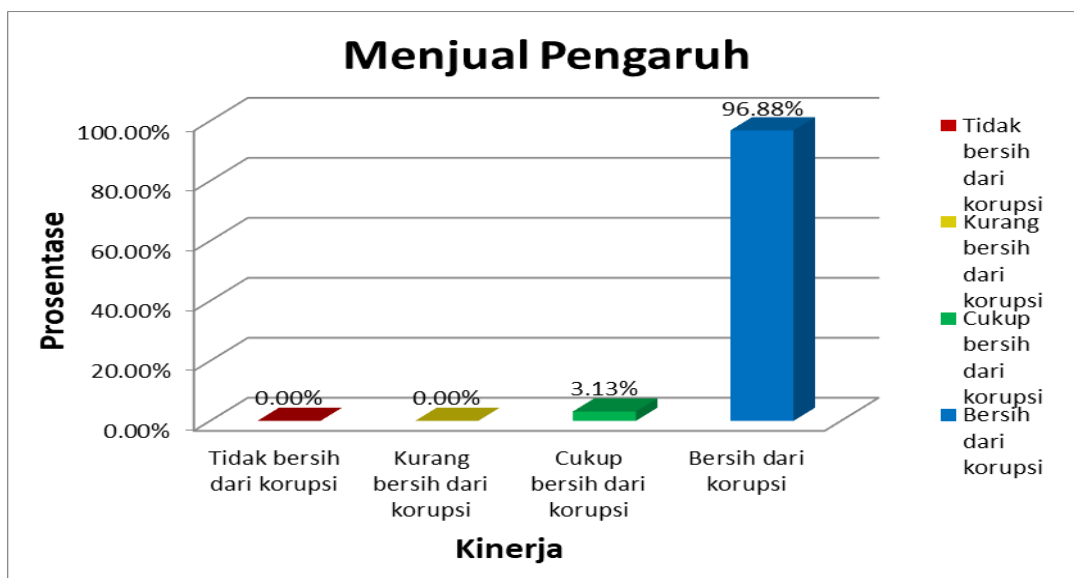
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 10.

Indeks pada indikator menjual pengaruh

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%	
Jumlah			32	127	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Menjual Pengaruh

3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

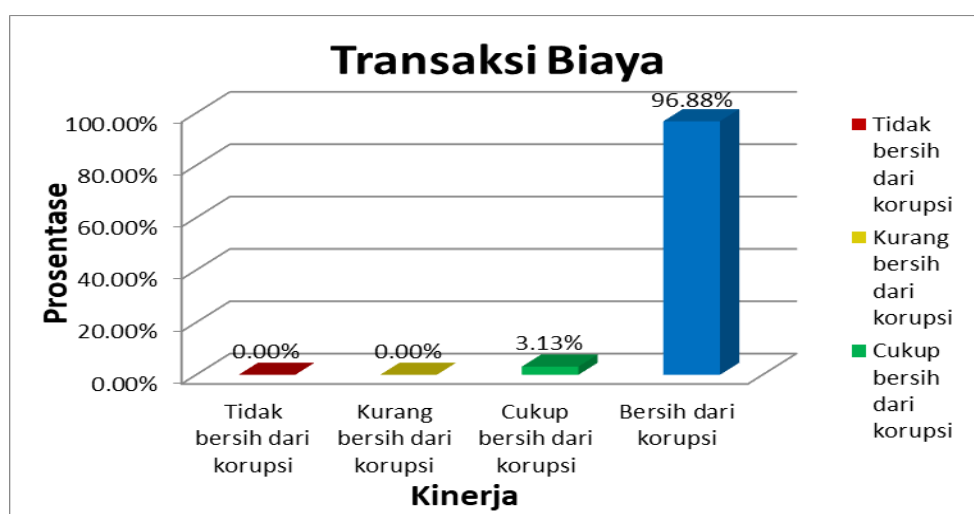
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 11.
Indeks pada indikator transaksi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%
Jumlah			32	127	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.4
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transaksi Biaya

3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

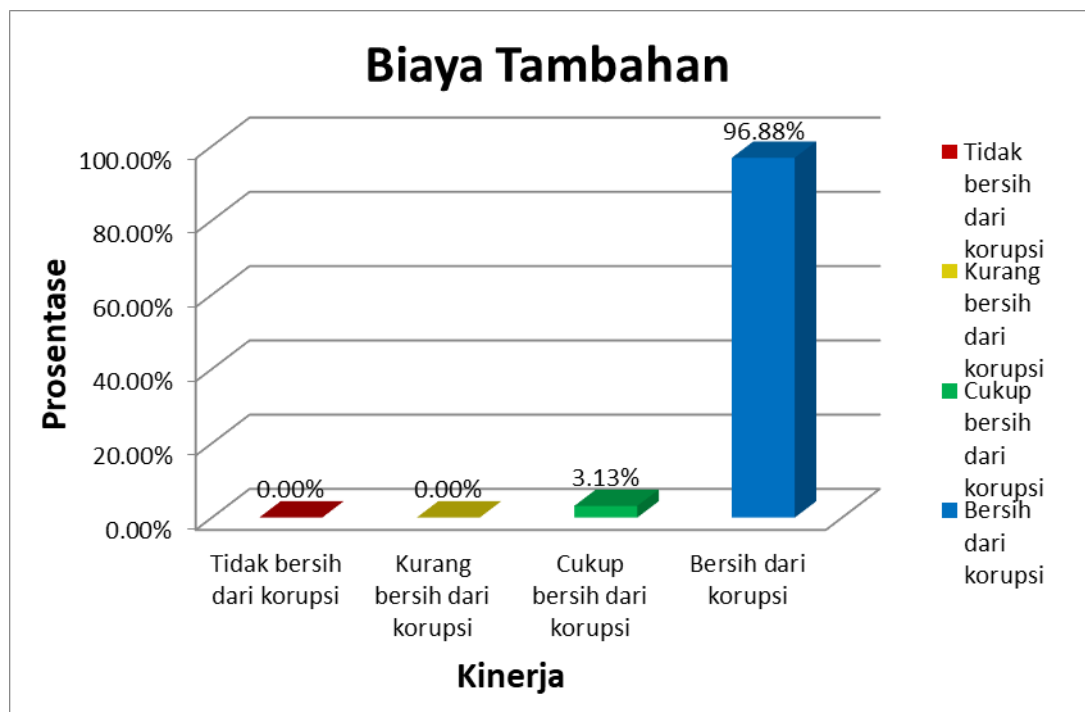
Tabel 12.

Tabel indeks pada indikator biaya tambahan

Nilai	Nilai	Kinerja	Frekuensi	Indeks/
-------	-------	---------	-----------	---------

Persepsi	Interval		f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	Nilai Rata-Rata
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%	
Jumlah			32	127	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.5
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Biaya Tambahan

3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

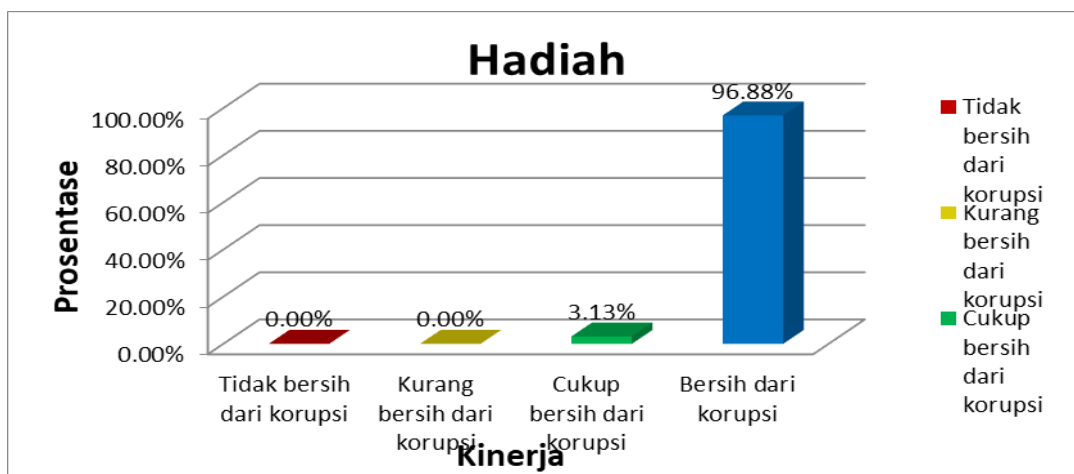
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 13.

Indeks pada indikator hadiah

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%	
Jumlah			32	127	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.6
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Hadiah

3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

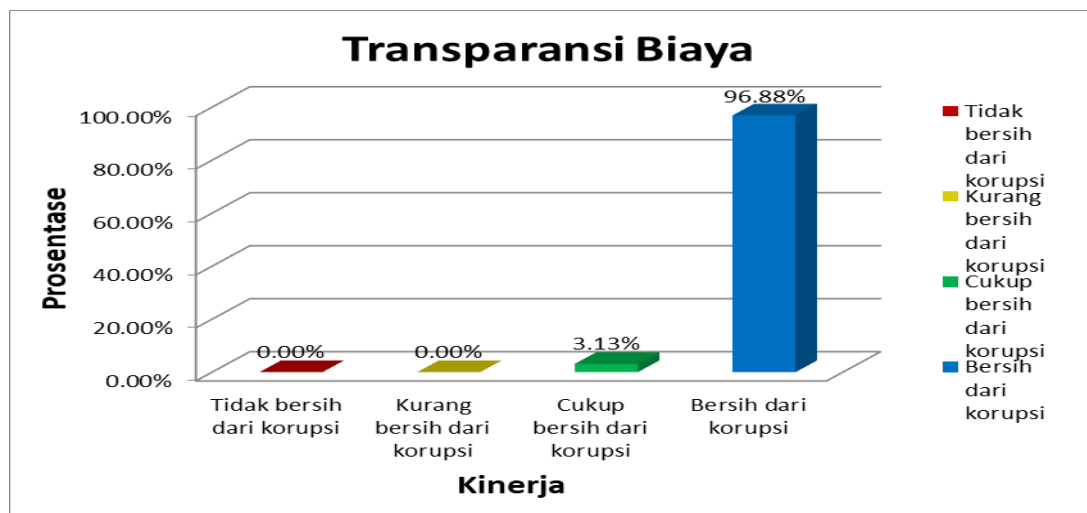
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 14.
Indeks pada indikator transparansi biaya

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-62.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%
Jumlah			32	127	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.7
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transparansi Biaya

3.2.8. Indikator Percaloan

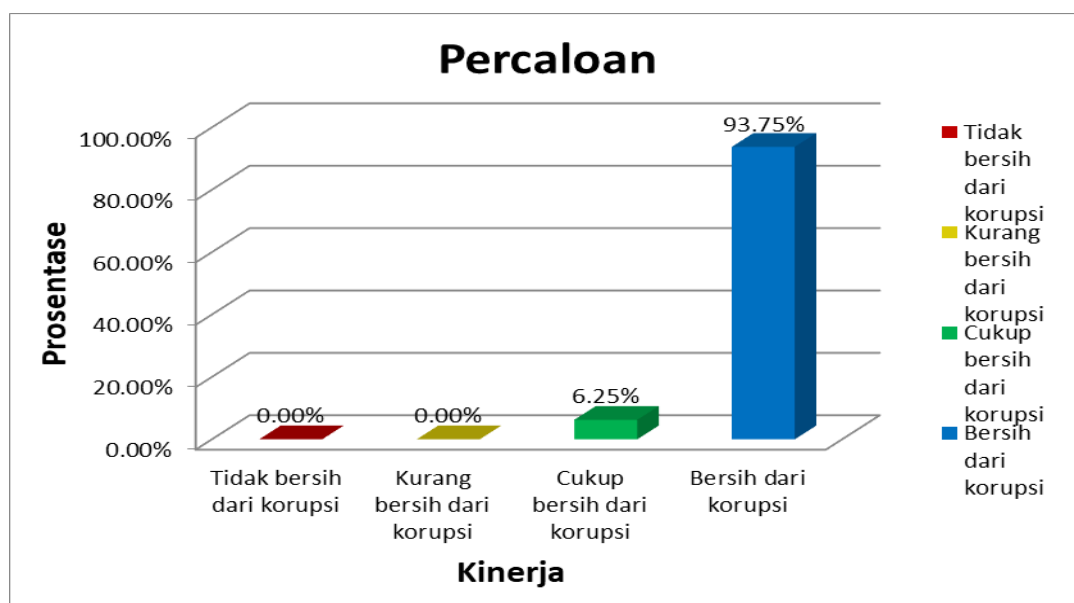
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,94.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari korupsi.

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.94
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	2	6	6.25%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	30	120	93.75%	
Jumlah			32	126	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.8

Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Percaloan

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

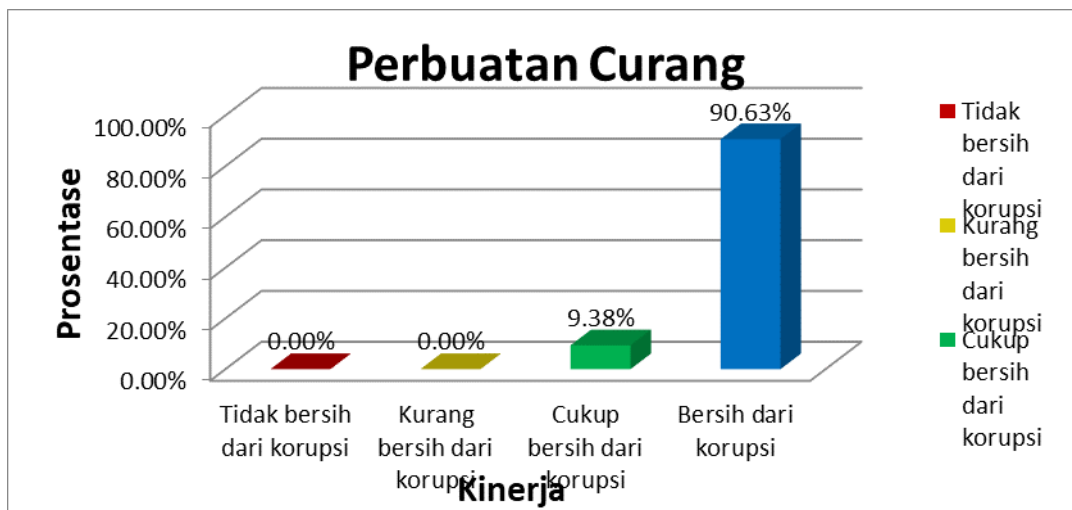
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bersih dari tindakan perbuatan curang.

Tabel 16.
Indeks pada indikator perbuatan curang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.91
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	
3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	3	9	9.38%	
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	29	116	90.63%	
Jumlah			32	125	100%	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.9
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Perbuatan curang

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,97.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya bebas dari transaksi rahasia.

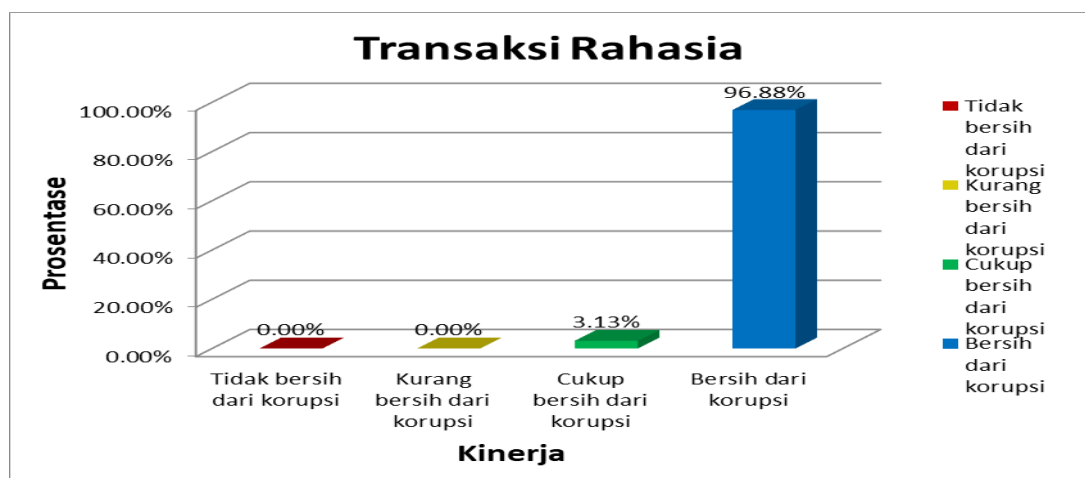
Tabel 17.

Indeks pada indikator transaksi rahasia

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Kinerja	Frekuensi			Indeks/ Nilai Rata-Rata
			f	Nilai Persepsi x f	Prosentase	
1	1.00-1.75	Tidak bersih dari korupsi	0	0	0.00%	3.97
2	1.76-2.50	Kurang bersih dari korupsi	0	0	0.00%	

3	2.51-3.25	Cukup bersih dari korupsi	1	3	3.13%
4	3.26-4.00	Bersih dari korupsi	31	124	96.88%
Jumlah			32	127	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam diagram berikut ini:



Gambar 3.2.10
Survey Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya
Indikator Transaksi Rahasia

3.3. Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebesar 3,96.

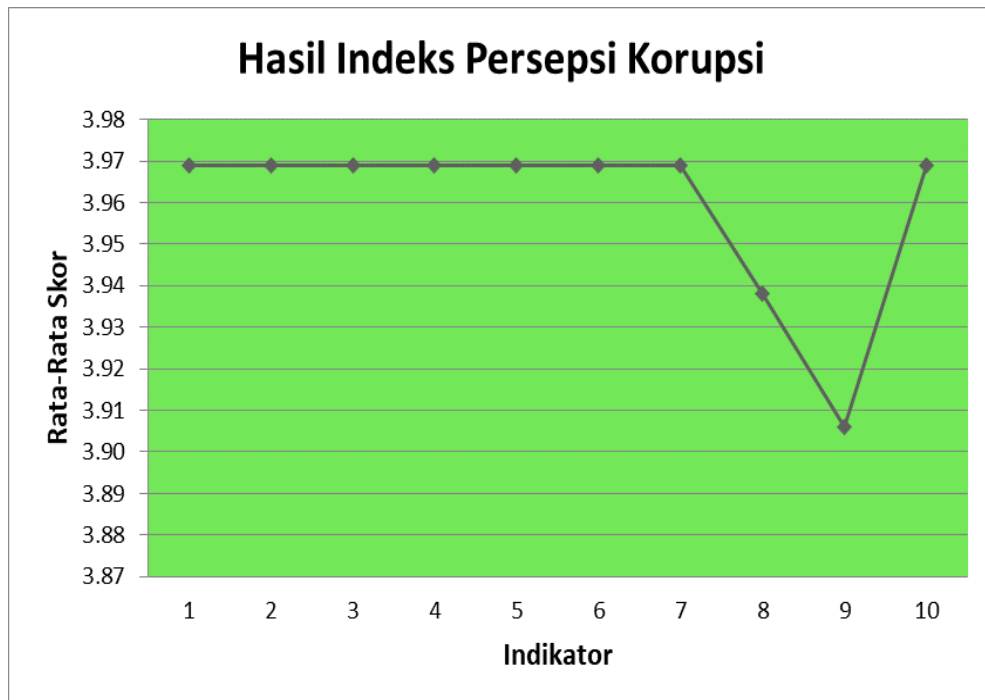
Tabel 18.
Survey Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Unsur Pertanyaan	NRR
Q 1	Manipulasi Peraturan	3.97
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3.97
Q 3	Menjual Pengaruh	3.97
Q 4	Transaksi Biaya	3.97
Q 5	Biaya Tambahan	3.97
Q 6	Hadiah	3.97
Q 7	Tranparansi Biaya	3.97
Q 8	Percaloan	3.94
Q 9	Perbuatan Curang	3.91
Q 10	Transaksi Rahasia	3.97
JUMLAH		39.60
NILAI RATA-RATA IPK		3.96

Keterangan :

Q1 - Q10 : Unsur-unsur Pertanyaan
NRR : **Nilai Rata-rata**
IPAK : Indeks Persepsi Anti Korupsi
: **Jumlah NRR IPAK**
*) **Tertimbang**
NRR Per Unsur : Jumlah nilai per unsur dibagi
Jumlah kuesioner yang terisi

IPAK : 3.96



Gambar 3.3
Indeks Persepsi Anti Korupsi PT Palangkaraya

Indeks Persepsi Anti Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Anti Korupsi berada pada angka 81,26 – 100,00.

Tabel 19.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan
Tinggi Palangkaraya

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPAK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari

				korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya
1	Mendaftar sebagai pengguna E-Court tanpa biaya
2	PT Palangka anti korupsi
3	PT Palangkaraya selalu memberikan pelayanan terbaik

4	Tanpa dipungut biaya
5	Gratis

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil Survey Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi **3,96** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,97;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,97;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,97;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,97.
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,97.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,97.
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,97.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,94.
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,91.
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,97.

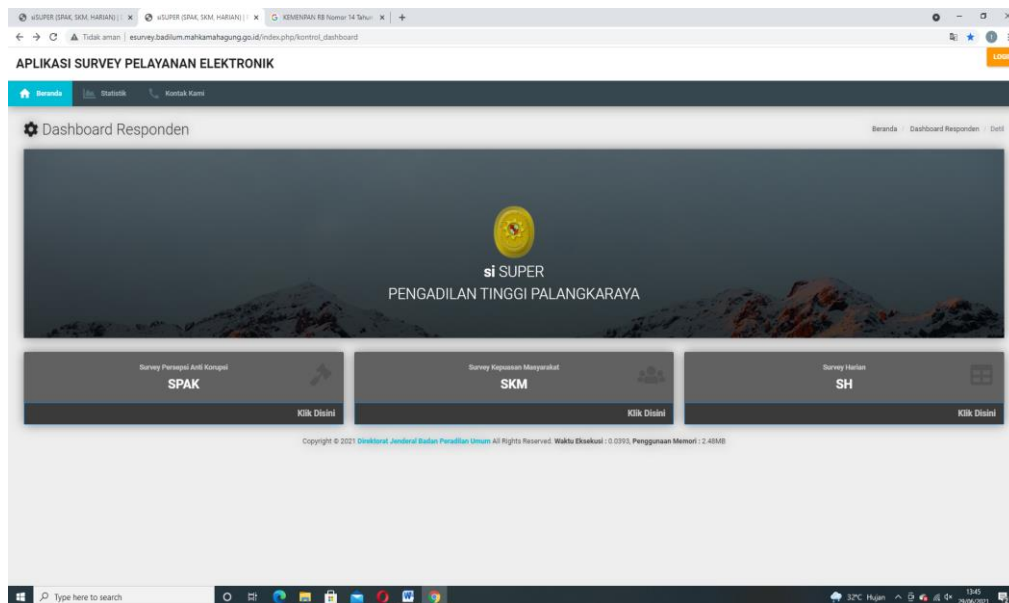
4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Palangkaraya Tahun 2022 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi Bersih dari Korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Perbuatan Curang memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya yaitu 3,91 dan tergolong dalam indikator kinerja bersih dari korupsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

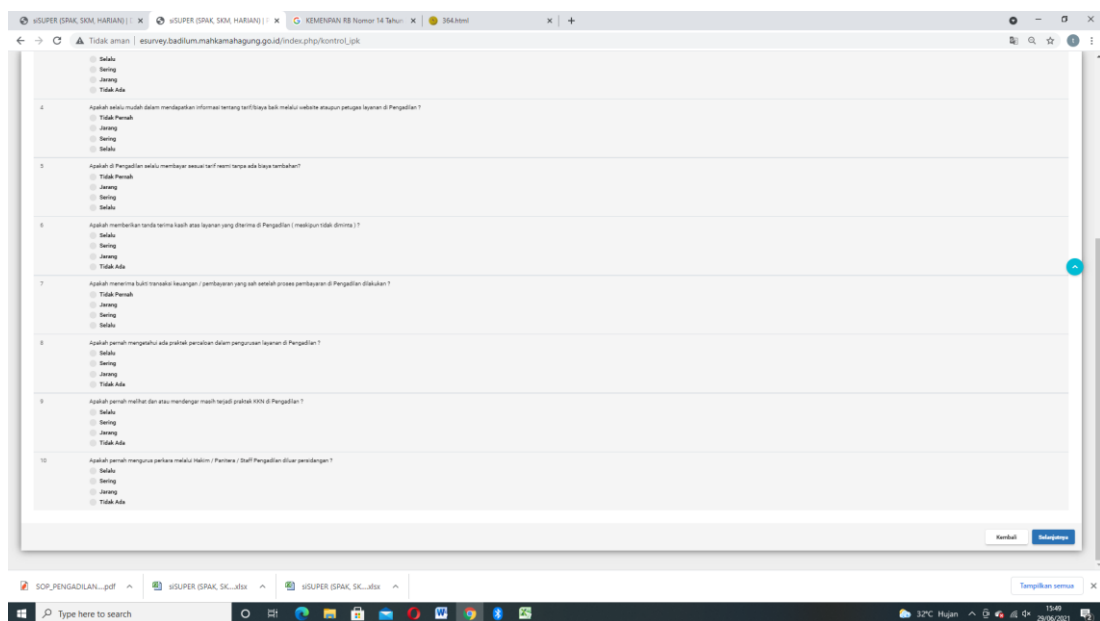
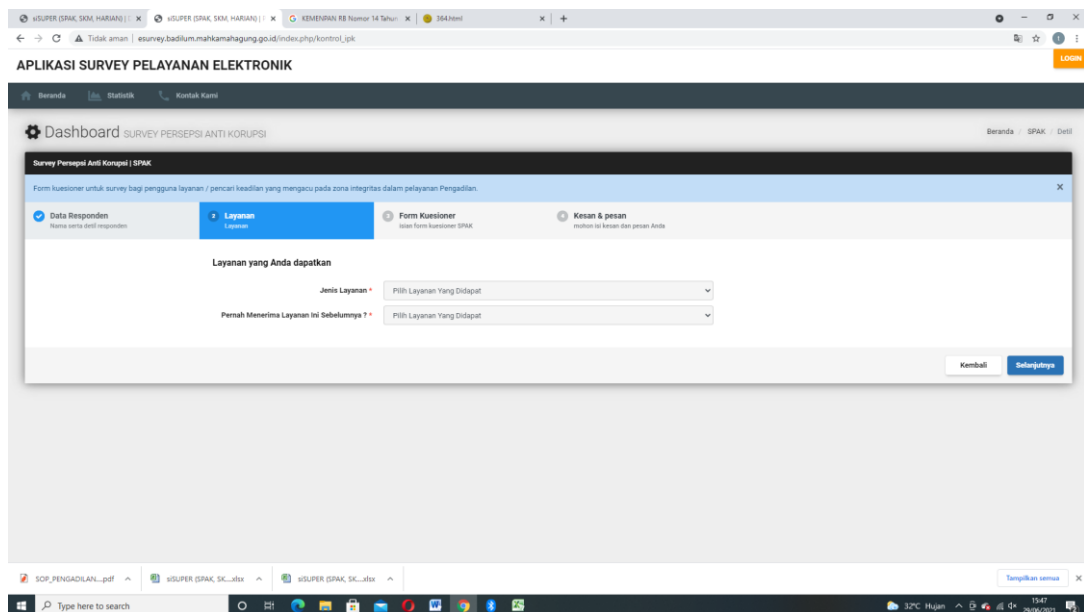
Foto si SUPER Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik

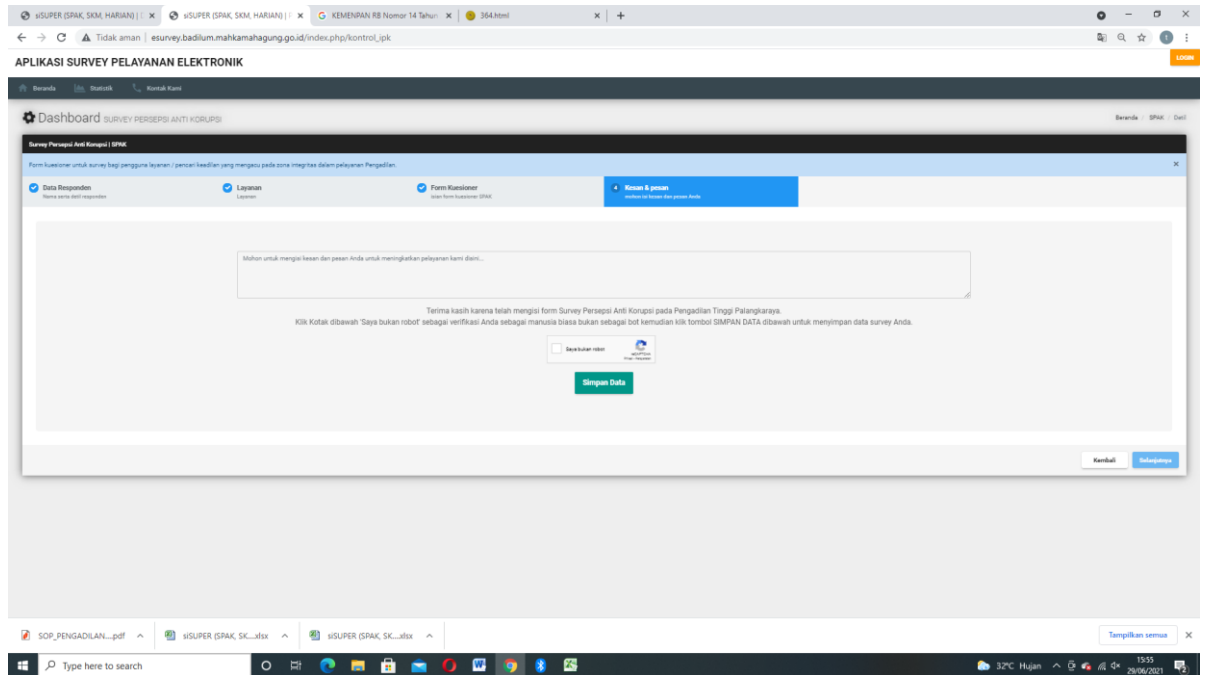


The screenshot displays the 'Data Responden SPAK' form within the 'si SUPER' application. The form is titled 'Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.' and includes a 'X' button to close it. The form is divided into sections: 'Data Responden SPAK', 'Layanan', 'Form Kuesioner', and 'Kesan & pesan'. The 'Data Responden SPAK' section contains the following fields:

- Nama**: Text input field with a placeholder 'Isilah inisial atau tidak diisi...'.
- Umur / Jenis Kelamin**: Two dropdown menus. The first is labeled 'Minimal 18 Tahun' and the second is labeled 'Pilih Jenis Kelamin'.
- Nomor HP**: Text input field with a placeholder '+62' and a note 'Contoh: 81211112222'.
- Domisili**: Dropdown menu labeled 'Pilih Wilayah'.
- Pendidikan**: Dropdown menu labeled 'Pilih Pendidikan'.
- Pekerjaan**: Dropdown menu labeled 'Pilih Pekerjaan'.

At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Kembali' (Back) and 'Selanjutnya' (Next).







PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

JL. RTA MILONO NO. 9 TELP. 3221853 – 3221854 FAX. 3221854
Website : <http://www.pt-palangkaraya.go.id>, e-mail : ptkalteng@pt-palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA

BERITA ACARA TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI SISUPER

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SITI ROCHMAH, S.H.
Jabatan : Koordinator Tim Survei
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2. Nama : HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.
Jabatan : Penanggung Jawab Tim Survei
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sudah diterapkannya penggunaan aplikasi SISUPER pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut:

Periode : Triwulan I Tahun 2022
Penyebab : Terjadinya gangguan jaringan internet ICON Plus pada kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
Akibat : Aplikasi SISUPER tidak dapat dipergunakan dan pengisian survei oleh pengunjung dilakukan secara manual.

Demikian berita acara ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Tim Survei,


SITI ROCHMAH, S.H.
NIP.195911291983022001

Penanggung Jawab Tim Survei,


HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.
NIP.197610012001121002

Mengetahui:

Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya,


SELAIMAN, S.H., M.H.
NIP.196003221982031004



PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

JL. RTA MILONO NO. 9 TELP. 3221853 – 3221854 FAX. 3221854
Website : <http://www.pt-palangkaraya.go.id>, e-mail : ptkalteng@pt-palangkaraya.go.id
PALANGKA RAYA

BERITA ACARA TIDAK MENGGUNAKAN APLIKASI SISUPER

Pada hari Jumat, tanggal Sebelas Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : SITI ROCHMAH, S.H.
Jabatan : Koordinator Tim Survei
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Palangkaraya
2. Nama : HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.
Jabatan : Penanggung Jawab Tim Survei
Unit Kerja : Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sudah diterapkannya penggunaan aplikasi SISUPER pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan rincian sebagai berikut:

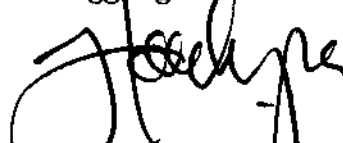
Periode : Triwulan I Tahun 2022
Penyebab : Terjadinya gangguan jaringan internet ICON Plus pada kantor Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
Akibat : Aplikasi SISUPER tidak dapat dipergunakan dan pengisian survei oleh pengunjung dilakukan secara manual.

Demikian berita acara ini dibuat sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Koordinator Tim Survei,


SITI ROCHMAH, S.H.
NIP.195911291983022001

Penanggung Jawab Tim Survei,


HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.
NIP.197610012001121002

Mengetahui:

Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya,


SULAIMAN, S.H., M.H.
NIP.196003221982031004

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei		
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		JAWABAN
(1)		(2)
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	☒ Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	☒ Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan Tinggi Palangka Raya) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	☒ Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	☒ Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	☒ Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	☒ Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	☒ Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?	☒ Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?	☒ Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tinggi Palangka Raya diluar persidangan?	☒ Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentingan ilmiah.
2. Cara pengisian Kuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei		
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)		JAWABAN
(1)		(2)
1.	Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	☒ a. Selalu sesuai prosedur b. Sering sesuai prosedur c. Jarang sesuai prosedur d. Tidak sesuai prosedur
2.	Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?	☒ a. Petugas melayani tanpa meminta imbalan b. Petugas melayani jarang meminta imbalan c. Petugas melayani sering meminta imbalan d. Petugas melayani selalu meminta imbalan
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan Tinggi Palangka Raya) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
4.	Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?	☒ a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
5.	Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?	☒ a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak Pernah
6.	Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
7.	Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?	☒ a. Selalu b. Sering c. Jarang d. Tidak pernah
8.	Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
9.	Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan Tinggi Palangka Raya?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu
10.	Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff Pengadilan Tinggi Palangka Raya diluar persidangan?	☒ a. Tidak Pernah b. Jarang/Pernah c. Sering d. Selalu